

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Akuntansi Sektor Publik

Organisasi jika dilihat dari tujuannya dapat digolongkan pada organisasi yang bertujuan atau bermotif mencari laba, dan organisasi yang bertujuan atau bermotif selain mencari laba. Akuntansi untuk organisasi yang bertujuan untuk mencari laba dikenal sebagai Akuntansi (Sektor) Bisnis, dan untuk organisasi yang bertujuan selain mencari laba dikenal sebagai Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai “suatu proses pengindetifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan” (Halim dan Kusufi, 2014). Hal ini didukung juga dengan teori menurut Nordiawan (2006) dimana organisasi sektor publik didefinisikan sebagai organisasi yang dikelola tidak untuk tujuan mencari laba.

Menurut Halim (2014) organisasi sektor publik paling mudah dikenal adalah organisasi pemerintah. Organisasi pemerintah sebagaimana organisasi publik umumnya akan beraktivitas berdasarkan anggaran. Anggaran dalam sektor publik merupakan suatu hal yang penting, dikarenakan anggaran dalam sektor publik berkaitan dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program dan aktivitas dalam satuan moneter. Suatu organisasi sektor publik dikatakan mempunyai kinerja yang baik jika segala kegiatannya berada dalam kerangka anggaran dan tujuan yang ditetapkan serta mampu

mewujudkan strategi yang dimiliki (Halim dan Kusufi, 2014). Menurut Mardiasmo dalam Halim dan Kusufi (2014) anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Bentuk anggaran sektor publik terwujud dalam APBN dan APBD, sehingga APBN dan APBD merupakan inti dari keuangan (akuntansi) pemerintahan karena anggaran merupakan informasi keuangan paling penting yang dihasilkan oleh pemerintah (Halim dan Kusufi, 2014)

2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product (GDP)* atau *Gross National Product (GNP)* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999) dalam Berliani (2016). Pendapat lain dikemukakan oleh Boediono (1999) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses pertumbuhan output perkapita jangka panjang yang terjadi apabila ada kecenderungan (output perkapita untuk naik) yang bersumber dari proses intern perekonomian tersebut (kekuatan yang berada dalam perekonomian itu sendiri), bukan berasal dari luar dan bersifat sementara. secara umum dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian suatu daerah yang memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan beberapa cara salah satunya yaitu dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli yang akan membentuk tiga dimensi dasar (BPS). Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.

2.3. Kesejahteraan Masyarakat

Dalam pertumbuhan ekonomi, perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah hal yang sulit untuk dipisahkan. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila memiliki dampak yang positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat apabila tidak diikuti dengan perkembangan pada kesejahteraan masyarakat akan memiliki dampak yang buruk, dikarenakan dapat menyebabkan kesenjangan dan ketimpangan dalam masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan namun hanya beberapa orang saja. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan bermasyarakat (Badrudin, 2012)

Menurut Todaro dan Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, dan memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi dimana segala kebutuhan dasar masyarakat seperti *sandang*, *pangan*, dan *papan* serta biaya untuk pendidikan dan kesehatan dapat terpenuhi.

Secara umum teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *classical utilitarianism*, *neoclassical welfare theory*, dan *new contraction approach* (Badrudin, 2012). *Classical utilitarianism* menekankan bahwa kepuasan atau kesenangan seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kepuasan setiap individu dapat dibandingkan secara kuantitatif. *Neoclassical welfare* menekankan pada prinsip *pareto optimality*. Pareto optimum didefinisikan sebagai sebuah posisi dimana tidak memungkinkan suatu realokasi input atau output untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa menyebabkan sedikitnya satu orang atau lebih buruk. *New contraction approach* menekankan pada konsep dimana setiap individu memiliki kebebasan maksimum dalam hidupnya. Ketiga pandangan tersebut menekankan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat tergantung pada tingkat kepuasan kesenangan yang diraih dalam kehidupannya.

United Nations Research Institute for Social Development menyusun delapan belas indikator yang apabila digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat maka perbedaan tingkat pembangunan antara negara maju dan negara sedang berkembang tidak terlampau besar. Delapan belas indikator tersebut, antara lain: 1) tingkat harapan hidup; 2) konsumsi protein hewani per kapita; 3) persentase anak-anak yang belajar di sekolah dasar dan menengah; 4) persentase anak-anak yang belajar di sekolah kejuruan; 5) jumlah surat kabar; 6) jumlah telepon; 7) jumlah radio; 8) jumlah penduduk di kota-kota yang mempunyai 20.000 penduduk atau lebih; 9) persentase laki-laki dewasa di sektor pertanian; 10) persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor listrik, gas, air, kesehatan, pengangkutan, pergudangan, dan transportasi; 11) persentase tenaga kerja yang memperoleh gaji; 12) persentase PDB yang berasal dari industri pengolahan; 13) konsumsi energi per kapita; 14) konsumsi listrik per kapita; 15) konsumsi baja per kapita; 16) nilai per kapita perdagangan luar negeri; 17) produk pertanian rata-rata dari pekerja laki-laki di sektor pertanian; dan 18) pendapatan per kapita Produk Nasional Bruto. Kesejahteraan dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator jumlah penduduk miskin.

2.3.1. Kemiskinan

Menurut Kuncoro dalam Machmud (2016), kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum, di mana pengukuran kemiskinan didasarkan pada konsumsi. Berdasarkan konsumsi ini, garis kemiskinan terdiri dari dua unsur yaitu (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan dasar lainnya dan (2)

jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dengan menetapkan beberapa kriteria kemiskinan yang mengacu pada besarnya pengeluaran tiap orang per harinya. Kriteria statistik dari BPS adalah sebagai berikut :

1. Tidak miskin, yaitu mereka yang pengeluaran per bulannya lebih dari Rp 350.610.
2. Hampir tidak miskin, yaitu orang dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488 sampai dengan Rp 350.610, atau sekitar antara Rp 9.350 sampai dengan Rp 11.687 per orang dalam satu hari.
3. Hampir miskin, yaitu orang dengan pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 233.470 sampai dengan Rp 280.488 atau sekitar antara Rp 7.780 sampai dengan Rp 9.350 per orang dalam satu hari.
4. Miskin, dengan pengeluaran per orang per bulan per kepala Rp 233.470 ke bawah atau sekitar Rp 7.780 ke bawah per orang dalam 1 hari.
5. Sangat miskin (kronis), tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang dalam satu hari. Tidak diketahui berapa jumlah pastinya.

Menurut Machmud (2016), terdapat beberapa faktor-faktor penentu kemiskinan di Indonesia yaitu :

1. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk.
2. Pendapatan Per Kapita Penduduk.
3. Rasio Ketergantungan Penduduk.

4. Pertumbuhan Ekonomi.
5. Presentase Tenaga Kerja DI Sektor Pertanian.
6. Presentase Tenaga Kerja DI Sektor Industri.

2.4. Laporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan

2.4.1. Pengertian Laporan Keuangan

menurut SAK laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya: sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (financial position), kinerja keuangan (financial performance), dan arus kas (cash flow) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya.

Komponen-komponen Laporan Keuangan menurut PSAK No. 1 (2012) bahwa laporan keuangan yang lengkap yang disusun oleh manajemen suatu perusahaan harus meliputi komponen-komponen berikut ini:

1. Neraca atau laporan posisi keuangan
2. Laporan laba rugi

3. Laporan perubahan ekuitas
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan

Komponen laporan keuangan menurut PSAK berbeda dengan laporan keuangan pemerintah. Pemerintah memiliki sendiri peraturan mengenai laporan keuangan yang tercantum dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen pokok laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/ Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Pusat/Daerah selama periode tertentu.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

2.4.2. Peranan Pelaporan Keuangan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap perundang-undangan. Suatu entitas pelaporan wajib melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2.4.3. Tujuan Pelaporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan pemanfaatan bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan serta hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan keuangan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.

5. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.5. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

2.5.1. Pengertian

Kinerja merupakan pencapaian atas tujuan yang direncanakan, baik secara individu maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya buruk. Menurut Halim (2008) salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan daerah adalah dengan cara menganalisis rasio keuangan daerah. Hal tersebut didukung juga oleh pendapat menurut Mardiasmo (2009) yang menyatakan Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan. Penelitian ini dibatasi dengan menghitung rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, dan rasio keserasian belanja.

2.5.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Hal tersebut didukung pula oleh pendapat Mahmudi (2010) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan pemerintah kabupaten dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Mahmudi (2010) menyatakan bahwa secara sederhana rasio kemandirian dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+provinsi+pinjaman}}$$

Tabel 2.1

Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber : Halim (2001) dalam Muhibtari (2014)

1. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
3. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.5.3. Rasio Efektivitas

Halim (2012) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Mahmudi (2010) menyatakan bahwa secara sederhana rasio efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Tabel 2.2.

Kriteria Rasio Efektivitas Penerimaan PAD

Presentasi Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Di atas 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
Di bawah 75	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2010) dalam Muhibtari (2014)

2.5.4. Rasio Efisiensi Belanja

Menurut Mahmudi (2007) rasio efisiensi belanja menggambarkan perbandingan antara realisasi pengeluaran/belanja daerah dengan anggaran belanja daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien. Pada sektor pelayanan masyarakat dikatakan efisien ketika kegiatan tersebut dilakukan dengan baik dan seefisien mungkin. Menurut Mahsun (2006) suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal. Menurut Mahmudi (2007) menyatakan bahwa rasio efisiensi diukur dengan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}}$$

Tabel 2.3

Kriteria Rasio Efektivitas

Presentase	Kriteria
Dibawah 60	Sangat efisien
60-80	Efisien
80-90	Cukup Efisien
90-100	Kurang Efisien
Diatas 100	Tidak Efisien

Sumber: Mahsun (2006) dalam Berliani (2016)

2.5.5. Rasio Keserasian Belanja

Dalam Mahmudi (2010), Analisis Rasio Keserasian Belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Agar fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik, maka Pemerintah Daerah perlu membuat harmonisasi belanja dengan melakukan Analisis Keserasian Belanja, antara lain :

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin/belanja operasi dan belanja pembangunan/belanja modal secara optimal Berliani (2016). Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin/belanja operasi berarti presentase belanja modal/pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Tabel 2.4

Pedoman Penilaian Keserasian Belanja

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
0 - 20	Tidak serasi
20 - 40	Kurang serasi
40 - 60	Cukup serasi
60 - 80	Serasi
80 - 100	Sangat serasi

Sumber: Mahsun (2006) dalam Berliani (2016)

2.6. Kerangka Konseptual

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan dana kepada masyarakat terutama dalam laporan APBD. Laporan APBD memuat kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangannya. Pemerintah yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah secara efektif dan efisien mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dapat mengalokasikan pendapatan secara merata, pembangunan yang adil dan merata serta dapat mengembangkan potensi daerah.

Dalam mengelola laporan keuangan pemerintah, tentu saja dibutuhkan penilaian untuk menilai baik buruknya pemerintah dalam mengelola keuangan daerah. Penilaian laporan keuangan daerah dapat dilakukan dengan cara menganalisis rasio dari laporan keuangan pemerintah dan juga dari laporan APBD. Analisis rasio dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan maupun kegagalan pemerintah dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini menggunakan 4 jenis rasio yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja laporan keuangan pemerintah :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2. Rasio Efektivitas
3. Rasio Efisiensi Belanja
4. Rasio Belanja Langsung

Dengan menggunakan beberapa rasio di atas dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan dari suatu daerah. Jika semua rasio di atas menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka Kinerja Keuangan dapat dikatakan baik.

Dari data rasio yang sudah ada akan dianalisis kembali pengaruhnya terhadap jumlah penduduk miskin sebagai indikator kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Rasio keuangan yang baik kemungkinan besar memiliki dampak yang positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Berliani (2016) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka” menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah selama tahun 2007-2014 sebagai sampelnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Berliani (2016) menyimpulkan bahwa kinerja secara deskriptif rasio kemandirian (X1) sangat rendah sekali karena hanya sebesar 7,15% dengan pola hubungan yang instruktif. Rasio efektivitas dan efisiensi masing-masing memiliki presentase sebesar 100,41% dan 95,45% yang artinya bahwa Kabupaten Majalengka sudah sangat efektif dan kurang efisien, lalu rasio keserasian belanja memiliki nilai sebesar 38,28 dan tergolong dalam kategori kurang serasi. Uji deskriptif untuk variabel dependen menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka dari tahun 2007-2014 adalah sebesar 4,65% dan tingkat kesejahteraan berdasarkan indeks IPM dari tahun 2007-2014 adalah sebesar 70,62%.

Uji secara verikatif menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi, begitu pula dengan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sendiri juga secara langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Uji hipotesis secara parsial juga menyatakan bahwa masing-masing variabel independen dari kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat, hasil yang sama juga ditunjukkan dari hipotesis dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Serupa dengan Berliani (2016), Suryaningsih (2012) juga menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Wijayanti (2015) dengan judul “Pengaruh PAD dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi” memberikan hasil bahwa secara langsung Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, hasil lain juga menunjukkan bahwa secara tidak langsung Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhibtari (2014) di Magelang dan Pramita (2015) di Kebumen diperoleh hasil pengujian secara deskriptif dimana tingkat kemandirian masih tergolong instruktif untuk masing-masing wilayah, untuk rasio efektivitas dan rasio efisiensi masing-masing daerah sudah tergolong baik, rasio keserasian Kota Magelang dan Kabupaten Kebumen masih belum

stabil atau tidak berimbang, sedangkan derajat desentralisasi fiskal Kota Magelang masih belum bagus dan rasio pertumbuhan PAD di wilayah Kabupaten Kebumen positif.

Penelitian yang dilakukan Syamsudin (2015) menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektivitas dan efisiensi tidak berpengaruh. Pengujian lainnya, yaitu pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan masing-masing menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pengujian secara tidak langsung, yaitu pengaruh kinerja keuangan terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa secara tidak langsung kinerja keuangan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
Berliani (2016)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka	Independen (X) : - Kemandirian - Efektivitas (X2) - Efisiensi (X3) - Keserasian Belanja (X4) Dependen (Y) : - Tingkat kesejahteraan masyarakat Mediasi (Z) : - Pertumbuhan	- Kinerja Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi - Kinerja Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap

		ekonomi	kesejahteraan masyarakat - Kinerja keuangan berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. - Uji parsial menyatakan bahwa kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan keserasian belanja berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. - Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Muhibtari (2014)	Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012	Independen (X) : - Rasio Keuangan Daerah (rasio kemandirian, derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasian belanja) Dependen (Y) : - Kinerja Keuangan	- Tingkat kemandirian berada pada kriteria instruktif. - Derajat desentralisasi fiskal masih kurang. - Tingkat efektifitas sudah efektif - Tingkat efisien sudah efisien.

		Pemerintah Daerah	- Rasio keserasian belanja menyatakan bahwa keseimbangan antar belanja belum seimbang.
Pramita (2015)	Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013	Independen (X) : - Rasio efektifitas PAD - Rasio efisiensi keuangan daerah - Rasio Keserasian - Rasio pertumbuhan PAD - Rasio kemandirian keuangan daerah Dependen (Y) : - Kinerja Keuangan Daerah	- Rasio efektifitas sudah bagus. - Rasio efisiensi keuangan daerah sudah efisien. - Rasio keserasian belum stabil - Rasio pertumbuhan Pad meningkat secara positif. - Rasio kemandirian masih tergolong rendah (instruktif).
Suryaningsih (2012)	Dampak Kinerja Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.	Independen (X) : - Kinerja Keuangan Daerah. Dependen (Y) : - Kesejahteraan Masyarakat.	Kinerja keuangan daerah (X) berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat (Y).
Syamsudin (2015)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan	Independen (X) : - Kemandirian Keuangan Daerah - Rasio Efektivitas - Rasio Efisiensi Dependen (Y) : - Tingkat pengangguran - Kemiskinan Mediasi (Z) : - Pertumbuhan	- Rasio kemandirian secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. - Rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

		ekonomi	- Rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. - Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran. - Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. - Kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. - Kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.
Wijayanti (2015)	Pengaruh PAD dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi	Independen (X) : - PAD - Dana Alokasi Umum Dependen (Y) : - Kesejahteraan Masyarakat Mediasi (Z): - Pertumbuhan ekonomi	Hasil pengujian langsung : - PAD dan Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi - PAD dan Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap

			kesejahteraan masyarakat Hasil pengujian tidak langsung : - PAD dan Dana alokasi umum secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
--	--	--	--

Sumber: Data diolah

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Kinerja Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Todaro dan Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, dan memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Dalam penelitian ini, kesejahteraan masyarakat diukur menggunakan indikator jumlah penduduk miskin. Berkurangnya jumlah penduduk miskin, tentu bisa menjadi suatu faktor yang menyatakan bahwa suatu daerah dapat dikatakan sejahtera.

Penelitian yang dilakukan Suryaningsih (2012) menyatakan bahwa Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian Berliani (2016) dimana kinerja keuangan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi baik secara parsial maupun secara simultan. Didukung juga dari penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2015) dimana baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa PAD dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan analisa atas hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha1 : Kinerja Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

2.8.2. Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product (GDP)* atau *Gross National Product (GNP)* tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999) dalam Berliani (2016). Hasil penelitian Berliani (2016) menyatakan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi baik secara parsial maupun secara simultan. Hal ini didukung pula oleh Penelitian yang dilakukan oleh Suryaningsih (2012),

dimana kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pembangunan daerah yang merupakan salah satu indikator juga dalam pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan analisa atas hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha2 : Kinerja Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.8.3. Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Menurut Todaro dan Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, dan memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Pertumbuhan ekonomi sendiri menurut *United Nations Development Programme* dapat diukur dengan empat indikator yang akan menghasilkan tiga dimensi dasar, yaitu (1) umur panjang dan hidup sehat, (2) pengetahuan, dan (3) standar hidup layak. Dalam penelitian ini, kesejahteraan masyarakat diukur menggunakan indikator jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tentunya akan memiliki dampak dalam perkembangan daerah tersebut dan

tentu saja akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Daerah dengan hasil pendapatan yang tinggi seharusnya mampu mengalokasikan pendapatan tersebut dengan adil dan merata, sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.

Hasil penelitian Berliani (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan. Hal ini didukung pula oleh Penelitian yang dilakukan oleh Suryaningsih (2012), dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan nyata terhadap kinerja pembangunan daerah yang merupakan salah satu indikator juga dalam pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan analisa atas hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha3 : pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

2.8.4. Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Daerah yang memiliki kinerja keuangan yang baik juga mengindikasikan memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang positif dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam hal penelitian ini berarti berkurangnya jumlah

penduduk miskin. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sudah baik dalam mengelola keuangan daerah dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakat semakin sejahtera.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Berliani (2016) menyatakan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian Syamsudin (2015) dimana secara tidak langsung kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap pengangguran dan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan analisa atas hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha4 : kinerja keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi.